

**EFEKTIVITAS PEMEKARAN KECAMATAN UMPU SEMENGGUK
DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN
POLITIKDI KABUPATEN WAY KANAN 2021-2022**

(Tesis)

Oleh
ROFIQ TRIHIDAYAT
NPM 1826021003



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**EFEKTIVITAS PEMEKARAN KECAMATAN UMPU SEMENGGUK
DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN
POLITIK DI KABUPATEN WAY KANAN 2021-2022**

Oleh

ROFIQ TRIHIDAYAT

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Abstrak

EFEKTIVITAS PEMEKARAN KECAMATAN UMPU SEMENGGUK DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN POLITIK DI KABUPATEN WAY KANAN 2021-2022

Oleh :

ROFIQ TRIHIDAYAT

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan politik di Kabupaten Way Kanan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara semi struktur, metode observasi non partisipan dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif meliputi; pengumpulan data (kondifikasi data) reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan pendekatan teori Efektivitas dari Campbell J.P yakni melihat dari keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, input dan output program serta pencapaian tujuan menyeluruh, dilihat dari pembangunan ekonomi yang berupa pertumbuhan ekonomi, rasio gini, indeks kualitas hidup secara fisik (PQLI), pembangunan berkelanjutan dan indeks kekayaan inklusif Kecamatan Umpu Semenguk serta dilihat dari pembangunan politik yang berupa kesempatan mengenyam pendidikan, kesempatan mendapat fasilitas kesehatan, kebebasan beragama dan mendirikan rumah ibadah serta kemudahan untuk memperoleh pelayanan publik. Adapun Faktor-faktor efektivitas pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan politik meliputi: (1) Penambahan potensi strategis, (2) Pemanfaatan SDM dan SDA, (3) Meningkatkan pelayanan publik yang meliputi; pendidikan, agama dan kesehatan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk memberikan efek yang cukup baik pada perkembangan perekonomian dan politik serta kesejahteraan masyarakat dengan adanya kemajuan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana, pemberdayaan, sosialisasi politik dan lainnya. Dampak pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk juga mampu mempengaruhi pola pikir dalam pengambilan keputusan baik individu maupun kelompok masyarakat dan perekonomian.

Kata Kunci: Efektivitas Pemekaran Kecamatan, Pembangunan Ekonomi dan Politik

Abstract

THE EFFECTIVENESS OF THE EXPANSION OF UMPU SEMENGGUK DISTRICT IN REALIZING THE ECONOMIC AND POLITICAL DEVELOPMENT GOALS IN WAY KANAN REGENCY 2021-2022

By:

ROFIQ TRIHIDAYAT

This study aims to describe the effectiveness of the expansion of Umpu Semenguk District in realizing the goals of economic and political development in Way Kanan Regency and to find out the factors that influence it. The research method uses qualitative methods with a descriptive type of research. The data collection tools used were in the form of semi-structural interviews, non-participant observation methods and documentation studies. The data analysis techniques used are descriptive qualitative including; data collection (data condensation) data reduction, data display and conclusion drawing. By using the effectiveness theory approach from Campbell J.P, which is to look at the success of the program, the success of the targets, satisfaction with the program, program inputs and outputs as well as the achievement of overall goals, seen from economic development in the form of economic growth, gini ratio, physical quality of life index (PQLI), sustainable development and inclusive wealth index of Umpu Semenguk District and seen from political development in the form of opportunities to receive education, the opportunity to obtain health facilities, religious freedom and the establishment of houses of worship and the ease of obtaining public services. The factors for the effectiveness of the expansion of Umpu Semenguk Subdistrict in realizing economic and political development include: (1) Additional strategic potential, (2) Utilization of human resources and natural resources, (3) Improving public services which include; education, religion and health. Based on this explanation, the expansion of Umpu Semenguk District has a fairly good effect on economic and political development as well as community welfare with the progress of development and improvement of facilities and infrastructure, empowerment, political socialization and others. The impact of the expansion of Umpu Semenguk Subdistrict is also able to influence thinking patterns in decision making, both individuals and community groups and the economy.

Keywords: Effectiveness of Subdistrict Expansion, Economic and Political Development

Judul Tesis

**: EFEKTIVITAS PEMEKARAN KECAMATAN
UMPU SEMENGGUK DALAM
MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN POLITIK DI KABUPATEN
WAY KANAN 2021-2022**

Nama Mahasiswa

: ROFIQ TRIHIDAYAT

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1826021003

Program Studi

: Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A
NIP 19780430 200501 1 002

Arizka Warganegara, Ph.D
NIP 19810620 200604 1 003

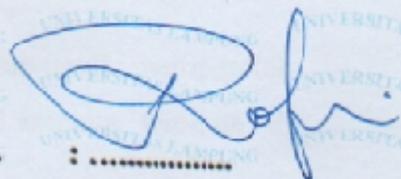
**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Lampung**

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601010 198603 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

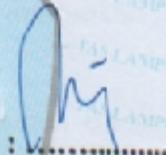
Ketua : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A.



Penguji Utama : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.



Sekretaris : Arizka Warganegara, Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 16 JUNI 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Magister) baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Juni 2022

Yang membuat Pernyataan,



Rofiq Trihidayat
NPM 1826021003

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Way Kanan pada tanggal 03 November 1994, sebagai anak ketiga dari tiga besaudara, dari Bapak Sukardi dan Ibu Sukarelawati. Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di SDN 02 Way Tuba, Kangkung Baru di selesaikan pada tahun 2006, Madrasah Tsanawiyah (MTs) di MTs Guppi Pisang Baru di selesaikan pada tahun 2009, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di SMAN 01 Way Tuba di selesaikan pada tahun 2012, Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu (S1) di Cimahi dan di selesaikan pada tahun 2017. Tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA melalui jalur mandiri.

PERSEMBAHAN



Allah SWT, untuk segala Rahmat & Hidayahnya dalam memberikan penulis kemudahan dalam menjalani hidup dan menyelesaikan tesis ini.

Kedua orang tua, Bapak dan Ibu untuk segala doa, dukungan dan restunya bagi penulis selama ini dan seterusnya.

Kedua kakakku, terimakasih untuk segala pengertian dan dukungannya.

Kekasihku, terimakasih untuk dukungan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Teman-teman Magister Ilmu Pemerintahan angkatan tahun 2018, terimakasih banyak untuk segala kebersamaan, pengalaman, dukungan dan segalanya selama kuliah di kampus ini.

MOTTO

"Tetap semangat jangan pernah menyerah ataupun mengeluh terhadap apa yang kita rasakan sekarang, karena apa yang kita lakukan sekarang itulah yang akan kita nikmati hasilnya nanti"

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmad dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat di selesaikan. Tesis dengan judul "*Efektivitas Pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Ekonomi dan Politik di Kabupaten Way Kanan 2021-2022*" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan FISIP UNILA;
2. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
3. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A., selaku pemimbing utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritikan dalam proses penyelesaian tesis ini;
4. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D., selaku pemimbing pendamping atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritikan dalam proses penyelesaian tesis ini;
5. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, M.IP., selaku penguji utama pada ujian tesis, terimakasih untuk masukan dan saran-saran pada seminar proposal, seminar hasil maupun sidang kompre;

6. Bapak dan Ibu Dosen FISIP dan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan., terimakasih telah membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan;

7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi FISIP UNILA., terimakasih telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama menjadi mahasiswa dan dalam proses penyelesaian administrasi tesis ini;

Bandar Lampung, 22 Juni 2022
Penulis,

Rofiq Trihidayat
NPM 1826021003

DAFTAR ISI

HALAMAN

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Efektivitas Pemekaran Kecamatan	12
2.1.1 Pengertian Efektivitas.....	12
2.1.2 Ukuran Efektivitas	12
2.2 Pemekaran Wilayah	13
2.2.1 Pengertian Pemekaran Wilayah	13
2.2.2 Kriteria dan Syarat-Syarat Pemekaran Wilayah	16
2.2.3 Tahap-Tahap Pemekaran Wilayah.....	18
2.2.4 Problem dalam Pemekaran Wilayah.....	20
2.2.5 Dampak Positif dan Negatif Pemekaran Wilayah	22
2.2.6 Upaya dalam Pemekaran Wilayah	24
2.2.7 Tujuan dalam Pemekaran Wilayah	25
2.3 Konsep Pembangunan.....	26

III. METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Tipe Penelitian	36
3.2 Alasan Pemilihan Fokus	37
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.4. Penentuan Informan	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6 Teknik Analisa Data	43
3.7 Teknik Uji Validitas Data	45
IV. GAMBARAN UMUM.....	47
4.1 Sejarah Berdirinya Kecamatan Umpu Semenguk.....	47
4.2 Kondisi geografis Kecamatan Umpu Semenguk	48
4.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Umpu Semenguk	49
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
5.1 Efektivitas Pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Ekonomi.....	51
5.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	51
5.1.2 Rasio Gini	53
5.1.3 Indeks kualitas hidup secara fisik (PQLI).....	54
5.1.4 Pembangunan berkelanjutan.....	55
5.1.5 Indeks kekayaan Inklusif (Wealth Index Inclusive).....	57
5.2 Efektivitas Pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Politik.....	58
5.2.1 Potensi Strategis untuk Mendapatkan Kesempatan Menyampaikan Pendapat dilihat dari Berfungsinya (Koperasi Unit Desa, Keberadaan Paguyuban dan Kelompok Sosial Masyarakat)	58
5.2.2 Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Dasar 9 Tahun	64
5.2.3 Pemerataan Kesempatan untuk Mendapatkan Pelayanan Umum (Kesehatan).....	66
5.2.4 Pemerataan Kesempatan Untuk Memeluk Agama dan Menjalankan Ibadah	67

5.2.5 Pemerataan Kesempatan Untuk Mendapatkan Kerja	68
5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Ekonomi dan Politik di Kabupaten Way Kanan.....	79

VI. PENUTUP.....	86
6.1 Kesimpulan	86
6.2 Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Sekolah di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016.....	2
2. Jumlah Madrasah di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016.....	2
3. Jarak dari Kampung ke Pusat Kecamatan, Kabupaten dan Kantor Polisi Tahun 2018.....	4
4. Jumlah Sekolah di Kecamatan Blambangan Umpu sebelum Pemekaran.....	5
5. Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2016.....	5
6. Jarak dari Kampung ke Kantor Kecamatan, Kabupaten dan Kantor Polisi Tahun 2020.....	6
7. Jumlah Sekolah di Kecamatan Umpu Semenguk setelah pemekaran data tahun 2020.....	6
8. Daftar Responden yang berasal dari 4 Informan.....	41
9. Data Luas Wilayah Kecamatan Umpu Semenguk.....	49
10. Jumlah Penduduk Kabupaten Umpu Semenguk Tahun 2020.....	50
11. Banyaknya Industri Menurut Jenis Industri.....	51
12. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin.....	53
13. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2020 dan 2021.....	54
14. Keberadaan Menara Telepon Seluler, Sinyal Telepon tahun 2020.....	56
15. Jumlah Permohonan Sertifikat Tanah Menurut Jenis Sertifikat.....	57
16. Potensi Strategis Kampung di wilayah Kecamatan Umpu Semenguk.....	59
17. Indeks Desa Membangun (IDM).....	61
18. Data BUMDes Kecamatan Umpu Semenguk.....	62
19. Penerima Bantuan Sosial di wilayah Kecamatan Umpu Semenguk.....	63
20. Sarana Pendidikan di Kecamatan Umpu Semenguk.....	64
21. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Umpu Semenguk.....	65
22. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Umpu Semenguk.....	66
23. Jumlah Perkembangan Penduduk Menurut Agama.....	67
24. Jumlah Rumah Ibadah di kecamatan Umpu Semenguk.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema Kerangka pikir	34
2. Penyerahan sertifikat BPOM produk UMKM Kampung Rambang Jaya	52
3. Penyerahan gedung display dan peralatan untuk tapis timbay Bratayudha	52
4. Kegiatan berbagi dan sosialisasi stuning Kampung Bratayudha	55
5. Kegiatan vaksinasi	55
6. Kegiatan MUSREMBANGKAM Kampung Sriwijaya T.A 2023	56
7. Kegiatan MUSREMBANGKAM Kampung Gedung Riang	56

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Pembangunan Manusia di Kabupaten Way Kanan menunjukkan arah yang positif. Selama delapan tahun terakhir dari tahun 2010 - 2018, nilai IPM Kabupaten Way Kanan terus mengalami peningkatan. Tahun 2010 IPM Kabupaten Way Kanan mencapai 61,27 dan terus meningkat hingga mencapai 66,63. Dalam rentang 5 tahun terakhir percepatan nilai IPM tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan nilai percepatan IPM sebesar 1,34 persen, sementara dari tahun 2017 ke 2018 mencapai 1,00, meningkat dari percepatan IPM tahun 2016-2017 yang sebesar 0,35. 16 -17 Presentase penduduk miskin di kabupaten way kanan Turun 0,17 Poin dari 13,7 % menjadi sebesar 12,19% pada Tahun 2020 sumber data Susenas Maret 2020 dan Tingkat pengangguran Terbuka mencapai 3,56 % dengan Jumlah Angkatan Kerja Pekerja Perempuan >> 90.909 Orang, Pekerja Laki-laki >> 153.979, Pengangguran Perempuan >> 4.168 Orang Pengangguran Laki-laki >> 4.879 Orang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan. “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Way Kanan tahun 2020”. diakses pada 3 Desember 2021).

Salah satu indikator yang dapat mempengaruhi peningkatan IPM yaitu dari tingkat pendidikan masyarakat. mengapa demikian, karena dengan adanya pendidikan masyarakat yang baik, dapat menjadikan pengelolaan sumberdaya alam yang ada juga lebih baik lagi, program-program yang dijalankan dapat tercapai, contohnya pada bidang pembangunan khususnya pembangunan ekonomi maupun politik.

Berdasarkan data-data diatas maka berikut ini data jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2016 :

Tabel 1. Jumlah Sekolah di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016

Jenjang Pendidikan	Negeri	Swasta
Taman Kanak-Kanak	8	327
Sekolah Dasar	298	12
Sekolah Menengah Pertama	63	23
Sekolah Menengah Atas	-	-
Sekolah Menengah kejuruan	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan. Diakses pada tanggal 3 Desember 2021.

Tabel 2. Jumlah Madrasah di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016

Jenjang Pendidikan	Negeri	Swasta
Taman Kanak-Kanak	-	-
Madrasah Ibtidaiyah	4	19
Madrasah Tsanawiyah	2	32
Madrasah Aliyah	1	19
Madrasah Aliyah Kejuruan	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan. Diakses pada tanggal 3 Desember 2021.

Adapun terkait data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Way Kanan tahun 2016 menurut data BPS Kabupaten Way Kanan, jumlahnya (Ribuan) 63,64 sekitar 14,58 % Garis Kemiskinan (Rupiah) 313 733.

Prinsip desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga mereka sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab dan tingkat transparansi pemerintahan yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan semata-mata untuk dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Akbar, 2018: 5).

Pemberlakuan desentralisasi pasca reformasi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga mereka sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab dan tingkat transparansi pemerintahan yang tinggi supaya dapat tercapai kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan beberapa kebijakan dalam rangka membentuk daerah otonomi baru.

Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan salah satu jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Pemekaran wilayah yang membentuk daerah otonom baru akan berpengaruh pada aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek sosial budaya serta aspek politik dan aspek tata ruang. Tujuan dari pemekaran daerah yakni mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah yang berorientasi pada kepuasan masyarakat (Pandie, 2018: 102).

Kebijakan otonomi baru menimbulkan dampak yaitu berupa pemekaran daerah Tujuan dari pemekaran daerah yakni mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan kesempatan berpolitik. Harapan pemekaran daerah bisa menjadi sasaran fungsi pembangunan yang diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, menciptakan kemandirian masyarakat, peningkatan kemampuan dan sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat (Murniati, 2017: 122).

Pemekaran daerah juga meliputi pemekaran/pembentukan kecamatan baru, hal ini disebabkan karena wilayah administratif daerah yang sangat luas, tentu memerlukan bantuan kecamatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah-wilayah terjauh dari pusat pemerintahan daerah. Dengan harapan dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang politik, dan ekonomi.

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (PP 19 tahun 2008). Dalam konteks ekonomi daerah di Indonesia, kecamatan merupakan perangkat daerah/kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat (Yulianti, 2017: 6332).

Kecamatan terbentuk dari beberapa desa atau kelurahan yang menjadi wilayah kerja camat dalam konteks ekonomi daerah kecamatan merupakan pelaksana teknis kewilayahan yang memiliki wilayah kerja tertentu dan dipimpin seorang camat. Menurut Oksep dkk (2016) menjelaskan bahwa kecamatan

merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Meskipun sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, kecamatan mempunyai kedudukan yang sangat cukup strategis dalam memainkan peran fungsionalnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan (Putri & Syahar, 2020: 133).

Berdasarkan pernyataan tersebut kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Posisinya sangat strategis dalam memainkan peran fungsionalnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan untuk mencapai kesejahteraan politik dan ekonomi.

Di bawah ini di tampilkan jarak kampung dengan Ibu Kota Kecamatan Blambangan Umpu tahun 2018 sebelum pemekaran :

Tabel 3. Jarak dari Kampung ke Pusat Kecamatan, Kabupaten dan Kantor Polisi Tahun 2018

Kode	Nama Kampung	Kecamatan (KM)	Kabupaten (KM)	Sektor Polisi
001.	Rambang Jaya	34	34	29
002.	Gistang	22	22	13
003	Negeri Batin	17	17	7
004	Negeri Baru	11	11	1
005.	Bumi Ratu	23	23	13
006.	Sriwijaya	26	26	16
007.	Sidoarjo	21	21	11
008.	Brata Yudha	25	25	15
009.	Gedung Batin	35	35	25
025.	Sri Rejeki	18	18	28
026.	Blambangan Umpu	-	-	11
027.	Lembasung	1	1	12
028.	Umpu Bhakti	3	3	11
029.	Umpu Kencana	6	6	16
030.	Karang Umpu	7	7	17
031.	Gunung Sangkaran	7	7	17
032.	Sangkaran Bakti	10	10	15
033.	Bumi Baru	15	15	25
034.	Tanjung Sari	21	21	31
035.	Tanjung Raja Giham	35	35	45

046.	Segara Midar	46	46	56
047.	Tanjung Raja Sakti	20	20	10
048.	Negeri Bumi Putera	28	28	18
049.	Panca Negeri	25	25	15
050.	Gedung Riang	40	40	30
051.	Ojolali	25	25	16

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan. Diakses pada tanggal 3 Desember 2021.

Berdasarkan data tersebut Desa Segara Mider dan Desa Gedung Riang menjadi desa yang paling jauh dengan pusat kecamatan dan pusat kabupaten, yaitu 46 KM dan 40 KM, dan desa yang paling jauh dari sektor polisi adalah Tanjung Raja Giham yaitu 45 KM dan Desa Tanjung Sari yaitu 31 KM. Jika ditinjau dari jarak desa ke pusat kota maka sangat perlu untuk di adakan pemekaran. Selain berdasarkan jarak, berikut ditampilkan kondisi Kecamatan Blambangan Umpu data tahun 2016 sebelum pemekaran.

Tabel 4. Jumlah Sekolah di Kecamatan Blambangan Umpu sebelum Pemekaran

Nomor	Sekolah	Negeri	Swasta
1	Taman Kanak-kanak	2	17
2	Sekolah Dasar	35	-
3	SMP	9	2
4	SMA	2	2
5	SMK	1	-
6	Madrasah Ibtidaiyah	1	2
7	MTS	-	5
8	MA	-	2

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan. Diakses pada tanggal 3 Desember 2021.

Tabel 5. Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2016

Nomor	Puskesmas	Jumlah
1	Perawatan	1
2	Non Perawatan	2
3	Pembantu	8
4	Keliling	3
5	Posyandu	40
6	Polindes	14

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan. Diakses pada tanggal 3 Desember 2021.

Sedangkan Jumlah Fasilitas keagamaan di Kecamatan Blambangan Umpu tahun 2016 masjid berjumlah 94, mushola berjumlah 25, gereja berjumlah 6,

vihara berjumlah 4 dan pure berjumlah 2. Jumlah keluarga sejahter / prasejahtera di Kecamatan Blambangan Umpu tahun 2016 prasejahtera : 3.449 orang dan sejahtera (I) : 7.313 orang dan sejahtera (II) : 3.804 orang.

Pascapemekaran menjadi Kecamatan Umpu Semenguk, yaitu sebagai lokus atau objek penelitian, maka data kecamatan ini juga berubah salah satunya sebagai berikut :

Tabel 6. Jarak dari Kampung ke Kecamatan, Kabupaten dan Kantor Polisi Tahun 2020

Kode	Nama Kampung	Kecamatan (KM)	Kabupaten (KM)	Sektor Polisi
001.	Rambang Jaya	21	34	29
002.	Gistang	12	22	11
003.	Negeri Batin	7	17	7
004.	Negeri Baru	1	11	1
005.	Bumi Ratu	7	23	9
006.	Sriwijaya	12	26	14
007.	Sidoarjo	4	21	6
008.	Brata Yudha	16	25	15
009.	Gedung Batin	21	35	23
048.	Negeri Bumi Putera	18	28	17
049.	Panca Negeri	30	25	28
050.	Gedung Riang	26	40	28
051.	Ojolali	15	25	14

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan. Diakses pada tanggal 3 Desember 2021.

Berdasarkan data tersebut terdapat perbedaan jarak tempuh antara sebelum dan sesudah pemekaran, diharapkan dari semakin dekatnya pusat pelayanan masyarakat berdampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi waktu dan dana masyarakat yang hendak mengurus atau memiliki keperluan di kantor camat atau pusat pelayanan yang lain.

Tabel 7. Jumlah Sekolah di Kecamatan Umpu Semenguk setelah pemekaran data tahun 2020

Nomor	Sekolah	Negeri	Swasta
1	Taman Kanak-kanak	1	7
2	Sekolah Dasar	18	-
3	SMP	3	-
4	SMA	1	-
5	SMK	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan. Diakses pada tanggal 3 Desember 2021.

Berdasarkan data tersebut dari segi ketersediaan lembaga pendidikan sangat perlu untuk ditingkatkan lebih lanjut, dikarenakan dengan jumlah desa adalah 15 desa dan jarak terjauh desa dengan kecamatan antara 26 sampai 30 KM dengan luas wilayah 32.789 Ha dan kepadatan penduduk 31.566 jiwa, serta pelayanan kesehatan berupa Rumah Sakit 1, puskesmas pembantu 5, poliklinik 2 dan Puskesmas Tanpa Rawat Inap 1, serta dengan jumlah keluarga 8.821 Keluarga dan keluarga penerima manfaat PKH sebanyak 1.863 keluarga.

Penelitian Sudirman Yunus, Eka Suaib, dan Jopang menunjukkan bahwa dampak pemekaran kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Polonggona dilihat dari sosial ekonomi masyarakat sangat positif dan signifikan melalui peningkatan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pasar. Demikian pula dengan rasio guru terhadap murid serta rasio tenaga kesehatan dengan penduduk. Demikian pula dengan ketersediaan pasar desa menunjang sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Polonggona. Demikian pula dampaknya terhadap pelayanan publik semakin baik. Sementara dampak pemekaran terhadap aparatur pemerintah juga sudah baik, namun persebaran aparatur tersebut belum merata antara kecamatan dan kelurahan (Yunus et al., 2020: 343).

Penelitian Sulthon Rohmadin dan Yusi Eva Batubara, ditinjau dari batas usia penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tana Righu dan penyelenggaraan desa di seluruh wilayah Kecamatan Tana Righu, yang semuanya di atas 15 (lima belas) tahun, maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tana Righu telah memenuhi syarat administratif untuk dimekarkan. Berdasarkan analisis kelayakan fisik kewilayahan, yang mempersyaratkan cakupan wilayah kecamatan baru untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa. Berdasarkan analisis kelayakan teknis, yang mempersyaratkan adanya penghitungan data kuantitatif terhadap potensi yang ada di Kecamatan Tana Righu, maka dapat ditegaskan bahwa Kecamatan Tana Righu telah memenuhi syarat untuk dimekarkan (Rohmadin & Batubara, 2017: 109).

Penelitian Devilia Zuliani dan S. Martono, Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan prima kantor kecamatan setelah pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Jepara baik dan sesuai dengan standar pelayanan ad-

ministrasi kecamatan, dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan angka dengan kategori tinggi (Zuliani & Martono, 2019: 866).

Penelitian Annisa Yulianti, menunjukkan gambaran bahwa secara keseluruhan Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Samarinda Kota belum berjalan dengan maksimal, karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa waktu pelayanan masih kurang efisien dan pelayanan di Kecamatan Samarinda Kota terkendala dengan gedung yang belum menetap sehingga pihak kecamatan tidak bisa maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam proses peningkatan efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Samarinda Kota diperlukan standar pelayanan sebagai acuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran atas pelayanan yang di berikan (Yulianti, 2017: 6327).

Penelitian Dwi Setiowati dan Indarti Komala Dewi, salah satu tujuan dari pemekaran wilayah adalah mempercepat pertumbuhan perekonomian wilayah. Percepatan pertumbuhan perekonomian wilayah pemekaran dapat dilakukan melalui pengembangan potensi unggulan komoditas pertanian unggulan adalah Jagung. Komoditas tersebut unggul untuk dikembangkan karena perkembangannya cepat dibandingkan komoditas lain di kecamatan Waelata dan mampu bersaing dengan komoditas yang sama ditingkat regional Kabupaten Buru dan Provinsi Maluku. Desa Parbulu berpotensi untuk berkembang lebih cepat sehingga dapat dijadikan pusat pertumbuhan utama, karena didukung aksesibilitas dan lahan yang dapat dikembangkan yang cukup tinggi. Melalui pengembangan komoditas unggulan Jagung dan pusat pertumbuhan utama di Desa Parbulu diharapkan Kecamatan Waelata sebagai wilayah pemekaran dapat tumbuh lebih cepat (Setiowati & Dewi, 2018: 81).

Penelitian yang dilakukan oleh Imanuel menyatakan bahwa proses pemekaran terdiri dari tiga tahapan besar yakni inisiatif pemekaran, pelaksanaan pemekaran, hingga pada peresmiannya. Peneliti juga menyoroti perkembangan penyelenggaraan pemerintahan pasca pemekaran di Kecamatan Malinau Selatan Induk yang disoroti adalah penyelenggaraan administrasi kependudukan, pelayanan publik, dan pembangunan. Bukan hanya itu saja peneliti juga tertarik untuk melihat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Malinau Selatan Hilir, yang dapat disoroti adalah administrasi kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan (Imanuel, 2016: 245).

Penelitian yang dilakukan oleh Reshy Novaria Putri dan Fitriana Syahar, Kelayakan rencana pemekaran wilayah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dianalisis berdasarkan persyaratan administrasi, persyaratan fisik kewilayahan dan persyaratan teknis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi persyaratan administrasi belum layak untuk dimekarkan, sedangkan dari segi persyaratan fisik kewilayahan sudah layak untuk dimekarkan dan dari segi persyaratan teknis juga sudah layak untuk dimekarkan menjadi sebuah kecamatan baru (Putri & Syahar, 2020: 132).

Penelitian yang dilakukan Hendra Try Ardianto, dan Laila Kholid Alfirdaus setidaknya ada dua skenario yang bisa dilakukan, yakni jangka pendek dengan penataan ulang kecamatan baru dan jangka panjang dengan pemekaran beberapa desa potensial. Dengan dua skenario itu, analisis artikel ini menyuguhkan signifikansi secara praktis bagaimana Kabupaten Kota Waringin Barat melakukan pemekaran agar mampu mendapatkan minimal 8 kecamatan (Ardianto & Alfirdaus, 2020: 99).

Penelitian yang dilakukan oleh Erman Episabri. Tidak mengherankan jika masih banyak daerah yang menginginkan daerahotonom baru, namun terganjal oleh beberapa hal, mulai dari level bawah (*Bottom Up*) hingga ketinggian atas (*Top Down*) yang menjadi penghambat, terutama yang berkaitan dengan keinginan kabupaten induk untuk melepas daerah yang menjadi cakupan wilayahnya. Selain itu, pemekaran daerah juga kerap kali terhalang oleh syarat yang terdapat pada Undang-Undang tentang pemerintahan daerah (Episabri, 2019: 160).

Penelitian dilakukan oleh Novita Tresiana, proses penetapan kebijakan pemekaran, bukanlah upaya solutif bagi persoalan substantive masyarakat dan rasionalitas yang digunakan dalam penetapan kebijakan, didominasi model rasionalitas tong sampah, sebagai respon struktur terhadap kepentingannya elit (politik), bersifat transaksional, bukanlah respon sistem (legislatif dan eksekutif) untuk mengatasi masalah faktual yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat (Tresiana, 2015: 161).

Penelitian Titus Bernadus Tului menunjukkan bahwa dampak pemekaran wilayah kabupaten dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melihat beberapa aspek yaitu pendapatan perkapita, kesehatan dan pendidikan yang telah mengalami peningkatan setelah dilakukannya pemekaran wilayah. Akan tetapi terdapat kendala yang menyebabkan dampak pemekaran wilayah kabupaten terhadap kesejahteraan masyarakat tidak maksimal, seperti: sarana akses jalan, lapangan pekerjaan, kurangnya tenaga pengajar dan tenaga medis dan sarana kesehatan yang perlu ditingkatkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik lagi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya (Tului, 2019: 1183).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait: **“Efektivitas Pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Ekonomi Dan Politik Di Kabupaten Way Kanan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas Pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Ekonomi Dan Politik Di Kabupaten Way Kanan?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Efektivitas Pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Ekonomi Dan Politik Di Kabupaten Way Kanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Ekonomi dan Politik di Kabupaten Way Kanan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Ekonomi dan Politik di Kabupaten Way Kanan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wacana tentang Efektivitas Pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Ekonomi Dan Politik di Kabupaten Way Kanan.
- b. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan.
- c. Sebagai acuan informasi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka Efektivitas Pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Ekonomi Dan Politik Di Kabupaten Way Kanan.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Efektivitas Pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Ekonomi Dan Politik Di Kabupaten Way Kanan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas Pemekaran Kecamatan

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “Efek” yang artinya hubungan sebab akibat, efektivitas dapat di pandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti bahwa, tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses. Menurut James L Gibson dkk (Pasolong, 2013) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan (Yuniningsih & Kharisma, 2017: 4).

Menurut Robbins (1994) efektivitas organisasi didefinisikan sebagai sejauh mana organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Etzioni (1964), mengemukakan pengukuran efektivitas organisasi yang disebut dengan “system model” mencakup empat kriteria yaitu kriteria adaptasi, kriteria integrasi, kriteria motivasi, kriteria produksi. Subekhi dan Jauhar (2013) mengatakan bahwa “pengukuran efektivitas organisasi sesungguhnya harus mencakup berbagai kriteria, yaitu efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi” (Putra, 2020: 2).

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Ukuran efektivitas menurut Sedarmayanti (2009) antara lain, yaitu:

- a. Input adalah segala sesuatu yang masuk kedalam sistem.
- b. Proses produksi dapat dilihat dari adanya komunikasi sebagai suatu proses yang memfokuskan pada interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

- c. Hasil (output) adalah komponen sistem yang berupa berbagai macam bentuk keluaran yang dihasilkan oleh komponen pengolahan.
- d. Produktivitas adalah suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang tercapai dengan sumber daya yang digunakan (Hertati, 2019: 24-25).

Menurut Campbell J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output dan pencapaian tujuan menyeluruh. Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Campbell, J. P., 1990) dalam (Anisah & Soesilowati, 2018: 46).

Konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektivitas sering dicampur adukkan dengan kata efisien walau artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukann secara efisien belum tentu efektif (Waworuntu, 2017: 4).

2.2 Pemekaran Wilayah

2.2.1 Pengertian Pemekaran Wilayah

Menurut Makagansa (2008) istilah pemekaran daerah sebenarnya dipakai sebagai upaya memperhalus bahasa yang menyatakan proses “perpisahan” atau “pemekahan” satu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. istilah perpisahan atau perpecahan memiliki makna yang negatif sehingga istilah pemekaran daerah dapat lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-daerah otonom baru pasca reformasi di Indonesia. (Ticoalu et al., 2017: 4).

Pemekaran adalah pemisahan atau memecahkan suatu bagian yang awalnya utuh menjadi beberapa bagian yang dapat berdiri sendiri atau masing-masing dapat berjalan sendiri. Pelaksanaan pemekaran wilayah pemerintah harus memperhatikan pembagian sumber daya antara daerah induk dan daerah pemekaran agar setelah terjadinya pemekaran tidak terjadi ketimpangan antar wilayah yang dimekarkan. (Adryan et al., 2018: 271).

Pemekaran daerah merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis. Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari rasio luas wilayah terbangun (*built-up area*) terhadap total luas wilayah. Semakin besar rasionya, maka semakin tinggi tingkat perkembangan wilayahnya.

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara terutamamemberikan pelayanan publik. Desentralisasi sering disebut pemberian otonomi. Pembentukan daerah otonomi, diantaranya melalui pemekaran daerah.Selama 16 tahun era desentralisasi, laju pertumbuhan DOB amat cepat. Selain pertumbuhan DOB, transfer penerimaan pusat ke daerah juga mengalami peningkatan (TriKurniasih et al., 2019: 159).

Sesuai dengan semangat reformasi yang terjadi pada tahun 1998, format penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia juga mengalami perubahan dari pendulum sentralisasi ke pendulum desentralisasi. Hal ini dapat dianalisis misalnya dari format pembagian kewenangan yang berpola residu dan peletakkan lokus otonomi daerah pada tingkat kabupaten/kota. Hal ini dianut secara tajam di dalam UU No 22 tahun 1999, dan mengalami pergeseran kembali di dalam UU No 32 tahun 2004. dan UU No 23 Tahun 2014 dan terakhir UU No 9 Tahun 2015. Berbagai kewenangan yang semula dimiliki oleh pemerintah pusat dan propinsi diserahkan kepada daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan tujuannya, maka penguatan otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota dimaksudkan untuk meningkatkan demokrasi partisipatif (*participatory democracy*) dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kewenangan yang dimiliki, kabupaten/kota dapat menentukan sendiri prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki (Nuradhawati, 2019: 153-154).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan penataan daerah. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian. Adapun tujuan dilakukannya penataan daerah tercantum dalam Pasal 31 : Pasal 31 : (1) Dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah: (2) Penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk : 1) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; 4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; 5) Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan 6) Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah (Mumek et al., 2020: 16).

Berdasarkan penjelasan di atas penelliti menyimpulkan bahwa pemekaran daerah merupakan suatu proses penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antar pusat dan daerah.

Pembentukan Kecamatan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Tentang kecamatan, pembentukan kecamatan sendiri secara khusus dijelaskan dalam Bab II Pasal 3 sebagai berikut: “pemekaran I (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih; dan Pasal 3 ayat 2 pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.; Persyaratan dasar pada pasal 4 ayat 1: (1) Persyaratan dasar pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi: a. jumlah penduduk minimal; b. luas wilayah minimal; c. usia minimal kecamatan; dan d. jumlah minimal desa/ kelurahan yang menjadi cakupan. Persyaratan teknis pada pasal 5 ayat 1: persyaratan teknis pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi: a. kemampuan keuangan daerah; b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan c. persyaratan teknis lainnya. Persyaratan administratif pada pasal 6 ayat 1, 2, dan 3.

Persyaratan administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di kecamatan induk dan kecamatan yang akan dibentuk. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh kelurahan”(Presiden Republik Indonesia, 2018).

Pemekaran kecamatan diizinkan apabila suatu kecamatan yang dimekarkan memenuhi persyaratan dasar, yang meliputi a. jumlah penduduk minimal; b. luas wilayah minimal; c. usia minimal kecamatan; dan d. jumlah minimal desa/ kelurahan yang menjadi cakupan. Persyaratan teknis yang meliputi kemampuan keuangan daerah; b. sarana dan prasarana pemerintahan. Dan persyaratan administratif yaitu kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di kecamatan induk dan kecamatan yang akan dibentuk.

2.2.2 Kriteria dan Syarat-Syarat Pemekaran Wilayah

Harapan pemekaran daerah bisa menjadi sasaran fungsi pembangunan yang diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, menciptakan kemandirian masyarakat, peningkatan kemampuan dan sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat (Murniati, 2017: 122).

Menurut Eko Prasoj, terdapat sejumlah faktor pendorong untuk melakukan tuntutan pemekaran daerah selama ini (Maulana, 2019: 175), yaitu :

- a. Pertama, tuntutan terhadap pemekaran adalah cara hukum mendorong pemerintah untuk mengalirkan keuangan negara ke daerah. Selama insentif keuangan berupa dana alokasi umum, dana alokasi atau dana perimbangan lainnya dari pemerintah pusat terus mengalir ke DOB, selama itu pula tuntutan pemekaran akan terjadi. Dengan kata lain, pemekaran adalah alat

- bagi daerah baru untuk menekan pemerintah pusat agar memberikan uang kepadanya.
- b. Kedua, selain berdimensi keuangan negara, pemekaran juga memiliki dimensi politik. Pemekaran merupakan cara politik untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada kader-kader partai politik di daerah untuk berkiprah di lembaga- lembaga perwakilan serta lembaga- lembaga pemerintahan daerah lainnya. Pembentukan DOB jelas diikuti pembentukan sejumlah struktur dan posisi di daerah seperti kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD dan posisi-posisi lainnya. Tidak mengherankan jika anggota DPR memiliki interest yang tinggi untuk terus berinisiatif membuat RUU pembentukan DOB.
 - c. Ketiga, pemekaran juga bisa berdimensi janji politisi kepada masyarakat di daerah pemilihannya (dapil). Apalagi menjelang pemilu, janji pembentukan DOB akan menjadi alat kampanye yang efektif untuk mendongkrak suara dalam pemilu. Kontra opini terhadap pemekaran bisa dipandang tidak pro daerah dan tidak pro rakyat.
 - d. Keempat, tentu saja sangat legitimate untuk menyatakan bahwa dari luas wilayah dan jangkauan pelayanan, pemekaran adalah jalan untuk mendekatkan pelayanan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun syarat yang harus dipenuhi suatu daerah untuk dapat di mekarkan syarat tersebut antara lain syarat teknis, fisik kewilayahan, dan administratif. Demikian juga pasal 5 Undang-undang No.32 Tahun 2004 sebagai revisi atas Undang-undang No.22 Tahun 1999 menjelaskan mengenai prasyarat administratif, teknis, dan kewilayahan,dalam pengadaan pemekaran suatu wilayah. Demikian juga halnya pada pasal 4 peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 (Sumarlis, 2018: 120).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih; dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Dalam Pasal 3 juga dinyatakan

bahwa untuk melaksanakan pemekaran kecamatan harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni: administratif; teknis, dan; fisik kewilayahan (Rohmadin & Batubara, 2017: 111).

2.2.3 Tahap-Tahap Pemekaran Wilayah

Pengaturan mengenai persyaratan pemekaran daerah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU No. 23 Tahun 2014), menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Penataan daerah sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Untuk mencapai tujuan penataan daerah tersebut, maka dilakukan pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Pembentukan daerah dimaksud dapat berupa pemekaran daerah dan dapat juga berupa penggabungan daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara spesifik mengenai persyaratan pembentukan kecamatan, karena peraturan lebih lanjut dan lebih spesifik akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) terkait penataan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (selanjutnya ditulis PP No. 19 Tahun 2008), untuk mengkaji kelayakan pembentukan/ pemekaran wilayah kecamatan tersebut (Raharja, 2016: 4).

Secara umum, pembentukan daerah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu persyaratan pertama, persyaratan dasar yang dimana persyaratan dasar terbagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Persyaratan dasar kedua yang harus dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi: 1) Geografi, 2) Demografi, 3) Keamanan, 4) Sosial politik, adat

istiadat, dan tradisi, 5) Potensi ekonomi, 6) Keuangan daerah, 7) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan (Episabri, 2019: 161-162).

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggung jawaban camat kepada Bupati/ Walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota (Ishak, 2019: 184).

- a. Pertama tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah.
- b. Kedua syarat-syarat pembentukan dan kriteria pemekaran adalah menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi seperti keamanan dan ketertiban.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut, yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. (Sutoro:2007). Dalam hal ini, fungsi utama camat

selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah (Rohmadin & Batubara, 2017: 111)

Padahal, sebagaimana diketahui, tugas seorang camat tidaklah sedikit. Menurut Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 Pasal 10, camat memiliki tugas meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, mengordinasikan agenda pemberdayaan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, menerapkan dan menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, memelihara prasarana dan sarana publik, mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan tugas lainnya sesuai aturan perundang-undangan (Ardianto & Alfirdaus, 2020: 100).

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (PP 19 tahun 2008). Dalam konteks ekonomi daerah di Indonesia, kecamatan merupakan perangkat daerah/kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat (Yulianti, 2017: 6332).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dinyatakan bahwa pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih; dan atau penyatuan wilayah kelurahan/desadari beberapa kecamatan. Sementara itu pasal 3 menyatakan bahwa untuk melaksanakan pemekaran kecamatan harus memenuhi beberapa persyaratan administasi, persyaratan fisik kewilayah dan persyaratan teknis. (Putri & Syahar, 2020: 136).

2.2.4 Problem dalam Pemekaran Wilayah

Salah satu kecenderungan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pemekaran wilayah di beberapa daerah provinsi dan kabupaten. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 telah mengatur bahwa pemekaran lebih dari satu wilayah memang dimungkinkan untuk dilakukan dengan pertimbangan

kemampuan ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, sosial politik, sosial budaya, luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan otonomi dapat dilaksanakan.

Pemekaran akan membawa implikasi-implikasi yang luas sebagai bentuk konsekuensi logis, seperti perubahan struktur pemerintahan, anggaran belanja pemerintah, batas dan nama wilayah, pembagian sumber penerimaan dan pendapatan daerah yang sebelumnya menginduk kepada daerah asal. Perubahan-perubahan tersebut, meski secara *dejure* telah diatur berdasarkan undang-undang, dalam praktiknya tidak semudah membalikkan tangan. Lepasnya daerah baru dari daerah lama, berarti pula adanya gradasi otoritas, pengurangan anggaran belanja, penurunan penerimaan dan pendapatan, di samping satu hal yang sudah pasti adalah berkurangnya luas wilayah.

Hal ini apabila tidak diperhatikan secara seksama dalam proses pembentukan daerah otonom baru berpotensi akan memicu konflik lintas daerah, sehingga menjadi kendala pelaksanaan otonomi daerah. Konflik lintas daerah yang melibatkan institusi pemerintahan, dapat berjalan dalam bingkai yang rasional, sehingga akan relatif dapat dicarikan resolusinya. Konflik akan meluas dan eskalatif, apabila hal tersebut berlangsung berlarut-larut. Akan muncul peluang bagi aktor-aktor yang sengaja memanfaatkan konflik lintas daerah tersebut untuk kepentingan politiknya. Konflikpun akan berjalan secara absurd tatkala telah menyentuh wilayah tradisional dan primordialisme kedaerahan. Konflik tidak lagi terjadi antar institusi pemerintahan yang bersifat vertikal, namun telah turun menjadi konflik horisontal yang memobilisasi massa dari kedua daerah yang bertikai.

Permasalahan pemekaran daerah terbagi dalam dua bagian, yaitu:

- a. Permasalahan yang terjadi pada proses awal pemekaran daerah dan menyebabkan permasalahan baru pada daerah induk dan daerah pemekaran saat pemekaran telah berlangsung, diantaranya : tidak adanya dukungan dan kesepakatan yang jelas antara daerah induk dan daerah pemekaran yang dapat menciptakan permasalahan:
- b. Sengketa aset antara daerah induk dan daerah pemekaran

- c. Perebutan sumber daya alam antar daerah induk dan daerah pemekaran.
- d. Sengketa pembagian dana perimbangan antara daerah induk dan daerah pemekaran.
- e. Lambannya proses-proses konsolidasi yang berlangsung di daerah pemekaran, sebab dalam masa transisi, daerah pemekaran kurang mendapatkan dukungan SDM dan infrastruktur dari daerah induk.
- f. Permasalahan yang timbul akibat tidak tuntasnya proses-proses yang terjadi pada periode pra-pemekaran.
- g. Potensi sumberdaya dan aset yang ada di daerah berpotensi menjadi rebutan antara daerah induk dan daerah pemekaran. Perebutan terhadap penguasaan sumberdaya dan aset daerah seringkali berpotensi konflik yang berbuntut pada tidak maksimalnya pengelolaan dan penggunaan sumberdaya dan aset tersebut. Hal ini memberikan gambaran betapa buruknya penataan wilayah daerah-daerah pemekaran dan tidak siapnya mengelola daerah dengan prinsip otonomi (Akbar, 2018: 8).

2.2.5 Dampak Positif dan Negatif Pemekaran Wilayah

a. Dampak Positif

Proses pemekaran kecamatan adalah proses pelayanan kepada masyarakat yang lebih maksimal dan merata yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran kecamatan juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian demi meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah tersebut. Dan proses pemekaran kecamatan adalah urutan pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kabupaten atau kota yang semakin lama semakin meningkat mengembangkan diri menjadi lebih dari satu, dalam konteks peningkatan secara bertahap, proses pemekaran kecamatan merupakan pembentukan wilayah baru yang berasal dari satu wilayah yang merupakan induk dari wilayah atau daerah tersebut (Imanuel, 2016: 249).

Pemekaran kecamatan memberikan dampak positif terhadap pelayanan kepada masyarakat serta pemekaran kecamatan memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan potensi wilayah seperti semakin meningkatnya produksi

pertanian seperti tanaman padi, kepala sawit, berkembangnya pasar tradisional. Pemekaran daerah merupakan solusi terbaik untuk pemerataan pembangunan daerah dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat (Yunus et al., 2020: 349).

Dampak sosial pemekaran wilayah kecamatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat terlihat pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidikan dan jumlah siswa yang terus mengalami peningkatan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan manusia. Terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan akses yang merata serta berkualitas adalah kewajiban pemerintah dalam menjunjung hak asasi manusia. Pendidikan juga menjadi kunci dalam menghapus kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan (Yunus et al., 2020: 348).

Terbukanya partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan politik suatu negara, terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting. Pentingnya partisipasi politik masyarakat berkaitan dengan hak dan kewajiban individu atau kelompok sebagai warga negara dalam menggunakan segala sumberdaya sosialnya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pemerintah (Silalahi et al., 2019: 40).

b. Dampak Negatif

Pemekaran daerah yang melahirkan prinsip otonomi daerah merupakan sistem yang sangat baik dalam tata kelola pemerintahan tanpa menghilangkan hubungan yang saling terikat antara pemerintah dan pemerintah daerah. Banyaknya bermunculan Daerah Otonom Baru (DOB) atau daerah pemekaran baru bukannya tidak meninggalkan masalah, ada beberapa hal yang perlu diketahui dengan adanya pemerintah daerah baru yang lahir dari proses pemekaran daerah, yakni:

- a. Banyaknya Peraturan Daerah yang bermasalah.
- b. Daerah Otonom Baru dapat membebaskan APBN.

- c. Daerah Otonom Baru dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok orang saja.
- d. Konflik DOB dengan daerah induk.
- e. Korupsi mewabah siring dengan banyaknya pemekaran daerah baru.
- f. Kualitas pelayan publik dan In-efisiensi kinerja aparatur pemerintahan daerah (Akbar, 2018: 11-13).

2.2.6 Upaya dalam Pemekaran Wilayah

Secara umum bahwa tujuan pembentukan atau pemekaran daerah adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik secara sosio-kultural, politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, walaupun pembentukan daerah otonomi baru akan meningkatkan biaya penyelenggaraan pemerintahan, namun peraturan pemerintah No. 129 Tahun 2000 Pasal 2 memiliki tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Abubakar et al., 2018: 147).

Sebelum dilaksanakannya pemekaran wilayah untuk mengurangi resiko wilayah pemekaran gagal untuk berkembang. Maka dibutuhkan beberapa pertimbangan sebelum dilaksanakan pemekaran wilayah diantaranya:

- a. Pertimbangan fungsi wilayah digunakan untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan yang ada dan distribusi penduduk di dalam masing-masing kecamatan pada wilayah administrasi suatu kabupaten atau kota.
- b. Pertimbangan kriteria fisik atau lingkungan diperlukan untuk menilai potensi lahan dan ketersediaan sumber daya lahan dalam kaitannya terhadap pembagian wilayah pemekaran yang bertujuan agar masing-masing wilayah hasil pemekaran dapat tumbuh dan berkembang.
- c. Pertimbangan kriteria ekonomi diperlukan untuk mengetahui potensi ekonomi masing-masing wilayah pemekaran.
- d. Pertimbangan kriteria sosial diperlukan untuk mengetahui, interaksi, dan aktivitas masyarakat sosial budaya masyarakat (Adryan et al., 2018: 272).

2.2.7 Tujuan dalam Pemekaran Wilayah

Adapun tujuan dari pemekaran wilayah adalah: pertama, kriteria efektivitas berkenaan bagaimana alternatif mencapai hasil yang diharapkan. Efektivitas dalam hal ini berhubungan erat dengan rasionalitas teknis. Kedua, kriteria efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas. Ketiga, kriteria kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang akan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria ini memfokuskan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang diharapkan. Keempat, kriteria pemerataan berkenaan dengan bagaimana biaya dan manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok tertentu. Kelima, kriteria responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Secara lebih aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari kebijakan yang dibuat. Keenam, kriteria ketepatan berkenaan dengan rasionalitas substantif atau apakah hasil yang diinginkan berguna atau bernilai (Duri & Rahmah, 2020: 46).

Terdapat dua alasan yang melatarbelakangi maraknya fenomena pemekaran wilayah di Indonesia diantaranya: 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, pendekatan pelayanan melalui pemerintah daerah yang baru diasumsikan akan lebih efektif dan efisien dibandingkan daerah induk. sesuai dengan kebutuhan lokal. 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi, pemekaran daerah diasumsikan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi lokal (Hakim, 2017: 844).

Ada dua hal penting yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu pertama bagaimana pemerintah melaksanakannya, dan kedua, bagaimana dampaknya di masyarakat setelah pemekaran tersebut berjalan selama lima tahun. Untuk hal yang pertama, aspek yang dikaji adalah sejauh mana 'input' yang diperoleh pemerintah daerah pemekaran dapat digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, aspek yang dievaluasi adalah keuangan pemerintah daerah dan aparatur pemerintah

daerah. Kedua aspek tersebut sangat dominan pengelolaannya oleh pemerintah daerah. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui enam cara di atas akan sulit direalisasikan tanpa adanya keuangan dan aparatur yang melaksanakannya. Hal yang kedua ialah melihat kondisi yang langsung diterima oleh daerah dan masyarakat, baik sebagai dampak langsung pemekaran daerah itu sendiri maupun disebabkan karena adanya perubahan sistem pemerintahan daerah. Apabila kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik, maka secara tidak langsung hal ini berpengaruh kepada akses masyarakat terhadap pelayanan publik, baik pendidikan maupun kesehatan.

2.3 Konsep Pembangunan

Pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. “Kepustakaan atau literatur politik menekankan dimensi politik dari pembangunan dan kecenderungan membedakan politik dan pembangunan ekonomi. Literatur ini dikelompokkan ke dalam tiga tipe: a. yang satu berasosiasi dengan gagasan-gagasan demokrasi, b. berfokus pada aspek-aspek pembangunan dan perubahan politik, dan c. menguji krisis konsekuensi-konsekuensi politik (Umar, 2020: 8258).

Pembangunan nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Tujuan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Utami & Wahyu Deni Prasetyo, 2019: 31).

Peletakan dasar pembangunan seharusnya tidak hanya mementingkan aspek ekonomi dan mengabaikan aspek sosial. Pembangunan yang hanya mengutamakan ekonomi dapat menimbulkan instabilitas dan dapat menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai.

Pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, “pembangunan” disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”. Dalam fenomena pembangunan yang kronis sesungguhnya tidak semata-mata merupakan persoalan ekonomis atau sekadar mengukur tingkat pendapatan dan tidak terbatas berupa masalah perhitungan masalah ketenagakerjaan atau penaksiran tingkat ketimpangan penghasilan secara kuantitatif (Jamaludin, 2016: 10).

Pertama, pembangunan mengandung makna proses. Ada tahapan-tahapan atau proses tertentu yang harus dilalui ketika pembangunan tersebut dilakukan. Daur proses itupun dapat dimulai melalui satu titik dan berakhir pada titik lain, lalu dimulai lagi dari titik awal dimana sebelumnya telah dimulai. Kedua, pembangunan mengandung arti perubahan menuju arah yang lebih baik. Ada pertambahan nilai (*value*) dan guna (*utility*) dari obyek pembangunan. Dalam hal ini, dapat juga dikatakan bahwa ada tujuan dan target tertentu dalam pembangunan. Ketiga, terdapat subyek, metode dan obyek dalam pembangunan. Ada subyek yang melakukan pembangunan, ada rangkaian langkah yang menjadi panduan, dan terdapat juga obyek atau sasaran pembangunan (Hasan & Azis, 2018: 4).

Menurut Bryant dan White dalam Suryono (2010), sebagaimana dikutip oleh (Adityawarman, 2020: 399) pembangunan berarti upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima implikasi utama yaitu:

- 1) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal baik individu maupun kelompok (*capacity*).
- 2) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).
- 3) Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).

- 4) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
- 5) Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (*interdependence*).

Adapun tujuan pembangunan terbagi atas 2 bagian, yaitu :

- 1) Tujuan Umum Pembangunan adalah suatu proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari yang terbaik atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan.
- 2) Tujuan Khusus Pembangunan ialah tujuan jangka pendek, pada tujuan jangka pendek biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu.

Sehubungan dengan kegiatan pembangunan tersebut, maka pembangunan itu sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut dalam (Mulyadi et al., 2019: 7-8):

- 1) Siagian (1992): Suatu usaha atau rangkaian dari perubahan yang berencana yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa.
- 2) Tjokroamidjojo (1992): Proses pengendalian usaha (administrasi) negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik demi kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.
- 3) Supriatna (2003): Sebagai sistem mencakup komponen a) masukan terdiri dari nilai, sumber daya manusia dan alam, budaya, kelembagaan masyarakat; b) proses, kemampuan organisasi dan manajemen pemerintahan dalam melaksanakan program pembangunan; c) keluaran, berupa perubahan kualitas perilaku manusia yang berakses pada kognisi, afeksi dan keterampilan yang berkaitan dengan taraf hidupnya.

Beberapa indikator kesejahteraan (pendapatan, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar, serta perumahan) digunakan dalam menganalisis hubungan pemekaran kecamatan dengan peningkatan kesejahteraan.

1. Pembangunan Ekonomi

Sejak pelaksanaan otonomi daerah (1999), terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola otonomi daerah. Hal ini membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah. Implikasi di bidang ekonomi yaitu terwujudnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan antardaerah, dan upaya pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Menurut Bendavid-Val (1991), pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah dalam menentukan sektor-sektor basis yang mampu mendorong ekonomi daerah, sedangkan sektor non-basic hanya merupakan sektor pendukung, misalnya perdagangan dan jasa-jasa (Ambya, 2019: 335).

Menurut Todaro (1997), pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan. Sedangkan pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga- lembaga nasional termasuk pula percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan atau pemberantasan kemiskinan yang absolut (Hasan & Azis, 2018: 8).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Nasional Bruto (PNB) tanpa melihat apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan/pertambahan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi dalam negara tersebut terjadi atau tidak (Hasan & Azis, 2018: 9-10).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara

adalah: a. Akumulasi kapital b. Pertumbuhan penduduk c. Kemajuan teknologi (Mulyani, 2017: 6-7).

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang dimana tersedia banyak barang-barang pemuas kebutuhan, sehingga masyarakat dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan. Dari kehidupan yang menyenangkan tersebut diharapkan timbul rasa perikemanusiaan dan membantu sesama. Kemudian pada akhirnya pembangunan ekonomi juga diharapkan dapat mengikis jurang perbedaan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju (Purnamasari, 2019: 10).

Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan yang menaik. Namun demikian tidaklah berarti bahwa pendapatan perkapita akan mengalami kenaikan terus menerus. Adanya resesi ekonomi, kekacauan politik, dan kemunduran ekspor, misalnya dapat mengakibatkan suatu perekonomian mengalami kemunduran tingkat kegiatannya. Jika keadaan demikian hanya bersifat temporer, dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ketahun, maka masyarakat tersebut dapatlah dikatakan mengalami pembangunan ekonomi.

Ekonomi wilayah adalah suatu studi yang mempelajari perilaku ekonomi dari manusia di atas tata ruang. Studi ini menganalisis proses ekonomi dalam lingkungan spasial (mengenai tata ruang) dan menempatkan kedalam struktur lanskap ekonomi (*economic landscape*). Sebagaimana diketahui bahwa teori ekonomi tradisional telah lama tidak mau mengenai aspek spasial dari perilaku ekonomi. Model-model klasik dibuat berdasarkan pada asumsi bahwa kegiatan ekonomi terjadi pada satu titik waktu (*one point*) tanpa memperhitungkan dimensi spasial. Pertanyaan utama dari ekonomi klasik adalah berkisar pada: *what to produce, how to produce dan for whom to produce*, yang artinya komoditas apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa komoditas tersebut diproduksi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dianalisis tanpa memasukkan

unsur jarak dan menganggap tidak ada biaya pengangkutan (Ridwan, 2016: 165).

Indikator pembangunan ekonomi secara kuantitatif tolak ukur keberhasilan pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi. Namun pada hakekatnya keberhasilan pembangunan dapat diatur dengan menggunakan beberapa indikator selain indikator ekonomi. Indikator-indikator keberhasilan pembangunan antara lain : (1) Pertumbuhan Ekonomi (2) Rasio Gini (3) Indeks kualitas hidup secara fisik (PQLI) (4) Pembangunan berkelanjutan (5) Indeks kekayaan Inklusif (*Wealth Index Inclusive*) dengan prasyarat adanya stabilitas nasional (tidak terjadi kerusuhan sosial) serta tidak terjadi kerusakan sumber daya alam (Fuady R, 2012: 1).

Ketika ilmu ekonomi pembangunan masih sangat muda, yaitu pada saat kemunculannya kembali pada tahun-tahun pertama setelah Perang Dunia II, melihat keberhasilan pembangunan ekonomi didasarkan atas *Gross National Product* (GNP) atau pertumbuhan GNP, sebagai indikator untuk mengevaluasi jalannya pembangunan ekonomi. Pembangunan akan dikatakan berhasil jika GNP bisa tumbuh dari tahun ke tahun (Chendrawan, 2017: 124).

Tingkat pertumbuhan ekonomi mengukur pertambahan pendapatan nasional riil, yaitu pendapatan nasional yang dihitung pada harga yang konstan. Kenaikan pendapatan nasional riil ini berarti barang-barang dan jasa yang dihasilkan sesuatu negara telah meningkat kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah kenaikan yang berlaku, jika dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya, menggambarkan tingkat (prestasi) pertumbuhan ekonomi yang dicapai sesuatu negara. Dengan demikian tingkat pertumbuhan ekonomi dalam sesuatu tahun tertentu (tahun t) dapat ditentukan dengan menggunakan formula berikut, lihat gambar:

Rumus Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (t)

$$g_t = \frac{Y_t^r - Y_{t-1}^r}{Y_{t-1}^r} \times 100$$

Dimana g_t adalah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun t yang dinyatakan dalam persen, Y_t^r adalah pendapatan nasional riil pada tahun t dan Y_{t-1}^r adalah pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Pendapatan nasional yang dimaksudkan dalam formula itu dapat diartikan sebagai Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto (Chendrawan, 2017: 124-125).

Dengan mengacu pada kepentingan nasional, setiap kebijakan yang dipilih baik yang terkait dengan luar maupun dari dalam negeri perlu dievaluasi atas manfaatnya bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Polemik pemanfaatan sumber daya alam, pinjaman luar negeri, kepemilikan asing, investasi dan perdagangan merupakan yang dirasakan perlu untuk ditingkatkan atas manfaatnya bagi kepentingan nasional. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, penajaman paradigma ini didasarkan pada esensi pembangunan bahwa pembangunan yang kita laksanakan adalah dari, oleh, dan untuk rakyat bukan segolongan orang (Hudi, 2020: 235).

2) Politik

Peristiwa-peristiwa yang mendorong ke arah politik berasal dari lingkungan internasional, masyarakat, ataupun dari elite-elite politik dalam sistem politik itu sendiri.

Keinginan untuk melakukan kegiatan politik mempunyai konsekuensi keterlibatan beberapa perubahan penting. Pembangunan berakhir ketika struktur dan budaya sistem politik tidak mampu mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapinya tanpa kelanjutan diferensiasi struktur dan sekularisasi budaya. Masyarakat tradisional dan maju juga mungkin memperlihatkan keruntuhan struktur modern yang terdiferensiasi dan

dominasi dari himbauan serta sikap tidak rasional ketika rintangan menjadi sangat besar. Problem pembangunan negara dapat timbul dari sebuah ancaman terhadap kehidupan sistem politik yang berasal dari lingkungan internasional. Hal tersebut dapat juga muncul dari ancaman yang berasal dari masyarakat dalam bentuk tekanan revolusioner yang menantang kestabilan atau kelangsungan hidup sistem politik. Atau hal ini juga merupakan hasil perkembangan tujuan-tujuan baru diantara elite politik, misalnya ekspansi nasional atau penciptaan sebuah kehidupan istana yang bermewah-mewah (Antoro et al., 2018: 55).

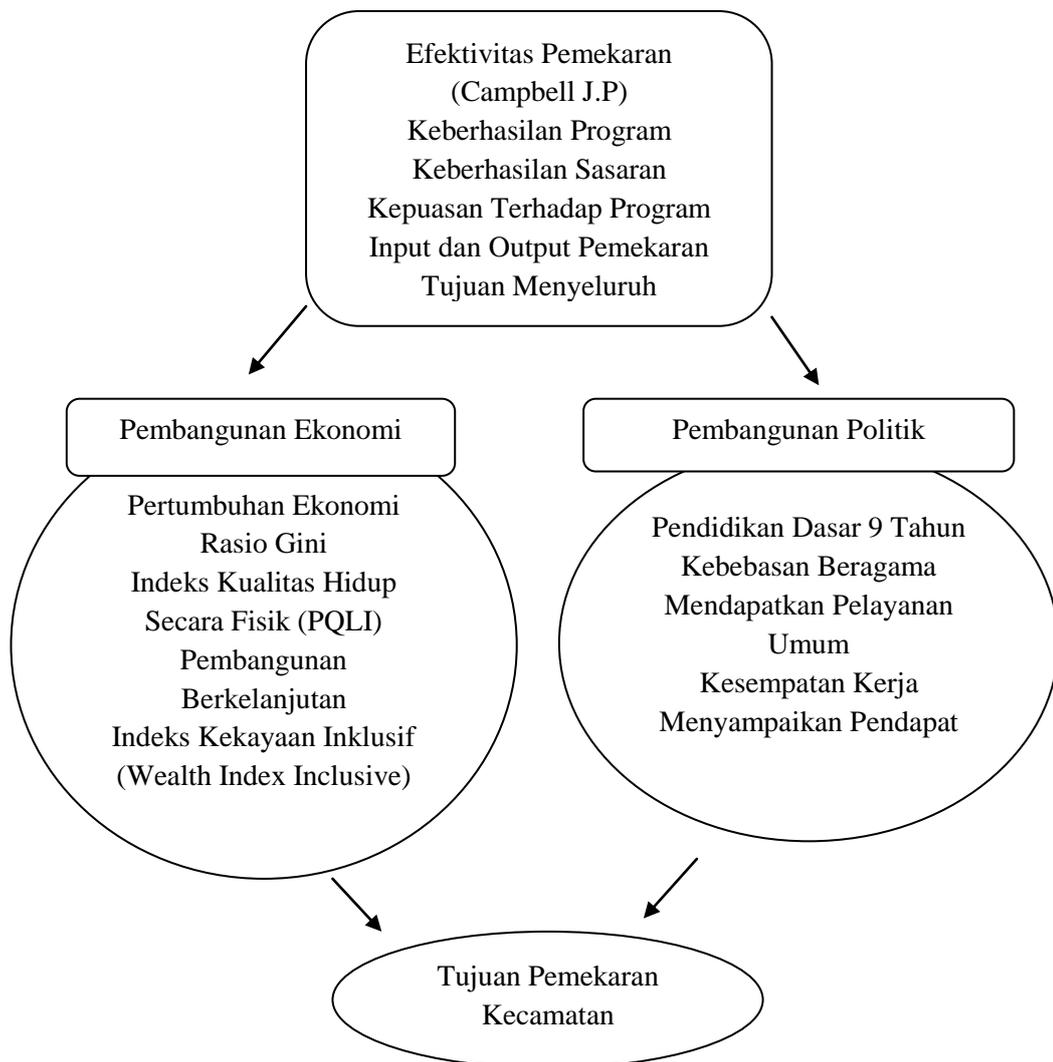
Menurut Huntington dan Dominguez (dalam Afan Gaffar, 1989). Sebagaimana dikutip oleh (Adityawarman, 2020: 398-399) konsep politik dikatakan mempunyai konotasi secara geografis, derivatif, teologis dan fungsional :

- a. Konsep geografis berarti terjadi proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metode yang pernah digunakan oleh negara-negara maju, seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik dan sebagainya. Secara geografis, negara yang ada di wilayah benua eropa dijadikan sebagai dasar perubahan politik yang digunakan konsepnya oleh negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang.
- b. Konsep derivative dimaksudkan bahwa politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya. aspek ekonomi menjadi tujuan pokok dari konsep ini.
- c. Konsep teologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan itu misalnya mengenai stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya. Juga termasuk didalamnya

tujuan pembangunan suatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional.

- d. Konsep fungsional diartikan sebagai suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem politik yang ideal dan ingin dikembangkan oleh suatu negara misalnya Indonesia ingin mengembangkan sistem politik demokrasi konstitusional.

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir



Berdasarkan gambar diatas, peneliti memaparkan bahwa untuk mencapai efektivitas pemekaran kecamatan yakni pada bidang pembangunan, baik pembangunan ekonomi dan pembangunan politik perlu ada ukuran dilihat dari : Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan Terhadap Program, Input dan Output Pemekaran serta Tujuan Menyeluruh baik dalam bidang pembangunan ekonomi yang meliputi : Pertumbuhan ekonomi, rasio gini, indeks kualitas hidup secara fisik (PQLI), Pembangunan berkelanjutan, Indeks Kekayaan inklusif (Wealth Index Inclusive) maupun pembangunan politik yang meliputi : Pendidikan Dasar 9 Tahun, Kebebasan Beragama, Medapatkan Pelayanan Umum, Kesempatan Kerja, Menyampaikan Pendapat.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk metode kualitatif lapangan (*field research*), alasan penggunaan metode penelitian ini karena peneliti harus terjun kelapangan, terlibat dengan masyarakat setempat, terlibat dengan partisi masyarakat berartit urut serta merasakan yang mereka rasakan. “Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat” (Raco, 2019: 9)

Mencermati uraian di atas, penelitian kualitatif dianggap tepat karena bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan penulis sebelumnya, yakni berkenaan “Efektivitas Pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Ekonomi dan Politik Di Kabupaten Way Kanan”, sejalan dengan penggunaan penelitian, dalam kualitatif juga bertujuan supaya data-data yang diperoleh mendasar sesuai dengan makna dan fakta di lapangan.

Kualitatif dianggap sesuai pada penelitian ini, disebabkan karena: 1) Kecamatan Umpu Semenguk pemekarannya diresmikan belum lama, jadi jika melihat perkembangannya secara kuantitatif sangat sulit, data yang didapat juga belum banyak, maka karena perkembangan ini sifatnya masih sederhana dan data yang ada masih sedikit sebab umur kecamatan belum mencapai tiga tahun, maka perkembangan secara kualitatif dianggap cocok untuk mengetahui Efektivitas Pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Ekonomi Dan Politik Di Kabupaten Way Kanan.

3.2 Alasan Pemilihan Fokus

Untuk membatasi ruang lingkup sebuah penelitian agar tidak melebar maka dibutuhkan fokus dalam penelitian. Fokus dalam penelitian berfungsi untuk membatasi studi bagi seorang peneliti dan menentukan sasaran penelitian sehingga dapat mengklasifikasikan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis dalam suatu penelitian (Moelong, 2017: 7). Sedangkan Sugiyono, 2009: 208) menyatakan bahwa “*A focused refer to a single cultural domain or few related domains*”. Oleh karena itu fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaharuan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada:

1. Berbicara mengenai pengukuran efektivitas dalam penelitian ini memakai konsep keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output dan pencapaian tujuan menyeluruh.
2. Indikator-indikator keberhasilan pembangunan antara lain: (1) Pertumbuhan Ekonomi (2) Rasio Gini (ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi penduduk) (3) Indeks kualitas hidup secara fisik (PQLI) (4) Pembangunan berkelanjutan (5) Indeks kekayaan Inklusif (*Wealth Index Inclusive*) dengan prasyarat adanya Stabilitas Nasional (tidak terjadi kerusuhan sosial) serta tidak terjadi kerusakan sumber daya alam.
3. Politik dalam penelitian ini diartikan sebagai partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan politik suatu negara, terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting. Konsep politik dikatakan mempunyai konotasi secara geografis, devertatif, teologis dan fungsional.

Adapun data mengenai hal-hal yang menjadi fokus adalah sebagai berikut:

- Untuk mendapatkan data pemekaran kecamatan pada bidang pembangunan ekonomi
 1. Pertumbuhan Ekonomi
 2. Rasio Gini
 3. Indeks kualitas hidup secara fisik (PQLI)
 4. Pembangunan berkelanjutan
 5. Indeks kekayaan Inklusif (*Wealth Index Inclusive*)

- Untuk mendapatkan data pemekaran kecamatan pada bidang pembangunan politik.
 1. Potensi strategis untuk mendapatkan kesempatan menyampaikan pendapat dilihat dari berfungsinya (Koperasi Unit Desa, keberadaan paguyuban dan kelompok sosial masyarakat).
 2. Pemerataan Kesempatan memperoleh pendidikan dasar 9 tahun
 3. Pemerataan Kesempatan untuk memperoleh pelayanan umum (kesehatan)
 4. Pemerataan Kesempatan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah
 5. Pemerataan kesempatan untuk mendapatkan kerja

- Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemekaran kecamatan.

Setelah data semua terkumpul, barulah langkah selanjutnya adalah mereduksi data yaitu kegiatan memilih dan memilah data yang dipergunakan dalam penelitian. Selanjutnya dilakukan pemaparan data (data display/penyajian data), penyajian data ini dapat berupa tabel atau uraian deskriptif. Setelah data semua disajikan proses selanjutnya adalah klasifikasi data (koding/pengkodean). Langkah terakhir adalah analisis data yaitu mencocokkan antara hasil dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dilakukan pembahasan dengan berpedoman teori untuk menjawab rumusan masalah, lalu dilakukan penarikan kesimpulan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian kualitatif terbagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Maleong: 2006). Jenis data pada penelitian ini adalah data pertumbuhan ekonomi, data pendapatan perkapita, data

Berdasarkan jenisnya, maka kita dapat membedakan data kualitatif sebagai data primer dan data sekunder (Sarwono, 2006) Dalam (Kusumastuti & Khoiron, 2019: 34)

a. Sumber Data Primer (Bahan Primer)

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan keempatnya (Hardani et al., 2020: 121).

Pihak Kecamatan Umpu Semenguk, tokoh masyarakat, dan pihak Kabupaten Way Kanan yang dijadikan sumber pengambilan data, yang menggunakan pemilihan sumber data memakai *purposive sampling* adalah teknik penentuan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang biasa digunakan adalah orang yang diperkirakan paling paham mengenai data atau keterangan yang dibutuhkan peneliti (Wekke, 2019: 46).

b. Sumber Data Sekunder (Bahan Sekunder)

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Hardani et al., 2020: 121).

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan penelitian dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder yaitu sumber dari bahan bacaan. Sumber data yang terdahulu terkumpulkan dan dilaporkan oleh orang dari

luar peneliti sendiri dan diperoleh dari bahan perpustakaan. Sumber data sekunder ini digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan atau ada dilapangan karena penerapan suatu teori yang kesemuanya tertulis dalam daftar pustaka.

3.4. Penentuan Informan

Subjek dalam penelitian kualitatif dinamakan dengan informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang suatu situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan adalah sumber data yang dibutuhkan oleh penulis dalam sebuah penelitian (Maleong, 2017: 132).

Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiono, 2018: 264).

Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian kualitatif adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran peneliti atau sumber yang dapat memberikan informasi dipilih secara tetap atau yang berkaitan dengan tujuan penelitian, maka subjek dalam penelitian ini ditentukan secara langsung oleh peneliti dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan penelitian yang diteliti tersebut.

Oleh karena itu peneliti menetapkan beberapa informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Daftar Responden yang berasal dari 4 Informan

No	Nama	Jabatan	Topik Wawancara
1	Rachmad Shalli Akbar, STP.,M.Si	Kasi Pemerintahan Kecamatan Umpu Semenguk	Sejarah dan Profil Kecamatan
2	Jami'an Zaicik, S.Pd.I	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umpu Semenguk	Pendidikan
3	Indra Junaidi, S.E., M.M	Tokoh Masyarakat dan Pengamat Ekonomi Kecamatan	Kondisi Ekonomi dan Politik Kecamatan
4	Imanto, S.H., M.M	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, hukum dan politik Way Kanan	Kondisi Politik Kecamatan dan Kabupaten

Sumber : Hasil Olah atau Penentuan Peneliti

Faktor yang menjadi pertimbangan pemilihan subjek penelitian ini karena subjek penelitian mewakili faktor-faktor yang menyebabkan suatu pemekaran kecamatan dizinkan. pemilihan subyek ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber sehingga data yang diperoleh dapat diakui kebenarannya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan dimungkinkan jika respondennya berjumlah sedikit (Nurdin & Hartati, 2019: 178).

Interview merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Interview yang terstruktur merupakan bentuk interview yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Interview semi

terstruktur, meskipun interview sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. Interview secara tidak terstruktur (terbuka) merupakan interview di mana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format-format tertentu secara ketat (Suyitno, 2018: 114).

Teknik wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara semi struktur meskipun interview sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. Dalam hal ini peneliti mempersiapkan point-point pertanyaan tentang Efektivitas Pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Ekonomi dan Politik di Kabupaten Way Kanan. Tujuan dari teknik ini adalah memperoleh data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah.

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Penggunaan observasi dalam pengumpulan data penelitian sosial di rasakan sangat penting. cara penelitian yang mengandalkan metode observasi amat penting, terutama jika penelitian tersebut dilakukan terhadap masyarakat yang masih belum terbiasa untuk mengutarakan perasaan, gagasan maupun pengetahuannya (Nurdin & Hartati, 2019: 173-174).

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Hal ini dikarenakan, dalam kegiatan sehari-hari penulis tidak berinteraksi langsung dengan subyek penelitian.

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamat. Pengamat harus jeli

dalam mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses (Siyoto & Sodik, 2015: 77).

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Guswandi, 2017: 117).

Sehingga fokus dalam pengumpulan data dilakukan terhadap setiap dokumen atau kegiatan-kegiatan yang meliputi penjabaran mengenai Jenis dan Sifat penelitian, tentang Efektivitas Pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Ekonomi dan Politik di Kabupaten Way Kanan.

3.6 Teknik Analisa Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif pada teorinya dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data kualitatif seringkali berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data (Ahmad, 2015: 180).

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif, artinya data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dilaporkan apa adanya kemudian diinterpretasikan secara kualitatif untuk mengambil kesimpulan proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dari wawancara dengan responden dan observasi yang kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan dari jawaban yang diperoleh. Adapun tahap-tahap teknik analisis data seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman (1990), yaitu model analisis data berlangsung atau mengalir (*flow model analysis*) yang dapat digunakan meliputi "Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data

kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus (Guswandi, 2017: 221-222).

Selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul:

1. Pengumpulan data (Kondifikasi data)

Pengumpulan data merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrument yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Merupakan tahap pengkodean terhadap data. Pengkodean data pada penelitian ini adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Cara melakukannya adalah peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang mereka buat (ketika wawancara)(Nurdin & Hartati, 2019: 208).

2. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan sangat banyak oleh karena itu perlu dicatat dengan teliti dan rinci. Peneliti perlu melakukan analisis data melalui reduksi data. Untuk mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data, maka data tersebut dirangkum, di seleksi hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal penting untuk dicari polanya.

3. Display data

Data yang diperoleh di lapangan berupa uraian deskriptif yang panjang dan sukar dipahami disajikan secara sederhana, lengkap, jelas, dan singkat tapi memenuhi kebutuhan data penelitian dan memudahkan peneliti dalam memahami gambaran dan hubungannya terhadap aspek-aspek yang diteliti. Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah tahap kodifikasi, dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan (Nurdin & Hartati, 2019: 209).

4. Penarikan kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data, tahap akhir yakni peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan sebagai hasil wawancara atau dari dokumen. Setelah kesimpulan diambil, untuk memastikan tidak ada kesalahan data, peneliti kemudian mengecek kembali kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data (Nurdin & Hartati, 2019: 209)

Analisa data merupakan tahapan dimana peneliti harus memaknai data yang terkumpul kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan singkat yang mudah dipahami dengan mengacu pada masalah yang diteliti. Data tersebut dibandingkan dan dihubungkan dengan yang lainnya, sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Analisis data dilakukan dalam proses pengamatan dan wawancara deskriptif, selanjutnya dilakukan analisis yang merinci data yang diperoleh lebih lanjut kemudian mengorganisasikannya. Analisis ini dilakukan bersamaan dengan pengamatan terfokus dan wawancara terkait dengan fokus penelitian yaitu Efektivitas Pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Ekonomi dan Politik di Kabupaten Way Kanan.

Tahap berikutnya dilakukan analisis dengan cara pengorganisasian hasil temuan data wawancara yang diperoleh. Tahap selanjutnya dilakukan dengan analisis tema untuk mendeskripsikan secara menyeluruh dan menampilkan makna yang menjadi fokus penelitian.

3.7 Teknik Uji Validitas Data

Data yang terkumpul selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi: Triangulasi, pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Kusumawardani et al., 2015: 58).

Jenis yang paling umum untuk triangulasi adalah (Kusumawardani dkk, 2015):

- a. Triangulasi Sumber adalah menggunakan sumber informan yang berbeda, serta melakukan kroscek serta membandingkan dan melakukan kontras data dengan sumber data yang lain.
- b. Triangulasi Metode adalah menggunakan berbagai metode dalam pengumpulan data misalnya dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, atau melakukan observasi untuk menjawab pertanyaan penelitian.
- c. Triangulasi Analisis adalah melakukan analisis data dengan melibatkan tim peneliti.
- d. Triangulasi Data adalah melakukan konfirmasi/umpan balik dari sumber data yang diteliti (Pradono et al., 2018: 41).

Dalam penelitian ini triangulasi sumber dan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan mengecek informasi data hasil yang diperoleh dari:

Teknik wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara semi struktur meskipun interview sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya.

Tidak semua fakta adalah data. Oleh karenanya, pengecekan beragam data dari beragam sumber akan mengurangi kesalahan sekaligus membuat kumpulan data tersebut menjadi data-data yang masuk akal (Zamili, 2015: 294).

Dalam Penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber dan metode. Dasar pertimbangan bahwa untuk memperoleh satu informasi dari satu informan perlu diadakan crsosschek antara informasi yang satu dengan informasi yang lain sehingga informasi yang diperoleh dapat dibuktikan kebenarannya (valid). Informasi yang diperoleh diusahakan dari narasumber yang betul-betul mengetahui permasalahan dalam penelitian.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Berdirinya Kecamatan Umpu Semenguk

Kecamatan Umpu Semenguk merupakan kecamatan baru yang berada di wilayah Kabupaten Way Kanan. Kecamatan Umpu Semenguk di resmikan pada hari kamis 2 Juli 2020, yang diresmikan oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Fahrizal Darminto di gedung *eks* RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Way Kanan.

Kecamatan Umpu Semenguk merupakan pemekaran dari Kecamatan Blambangan Umpu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu dan Pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 138/155/ BAK tertanggal 31 Maret 2020, Nomor Registrasi Kecamatan Umpu Semenguk adalah 18.08.15.

Dengan diresmikannya Kecamatan Umpu Semenguk, total kecamatan di Kabupaten Way Kanan menjadi 15 (lima belas) kecamatan. Pada peresmian Kecamatan Umpu Semenguk Bupati Way Kanan juga menunjuk salah satu ASN yaitu Satria sebagai Plt. Camat Umpu Semenguk. Kecamatan Umpu Semenguk terdiri dari 13 (tiga belas) kampung yaitu Negeri Baru, Bumi Ratu, Bratyudha, Negeri Batin, Rambang Jaya, Sidoarjo, Ojolali, Negeri Bumi Putera, Sriwijaya, Gedung Riang, Gistang, Gedung Batin dan Panca Negeri.

Dengan diresmikannya Kecamatan Umpu Semenguk ini diharapkan dapat mendukung percepatan terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan juga membantu pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung serta nawacita pembangunan nasional.

Adapun visi dan misi Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 adalah visinya “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” dan misinya 1). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 2). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; 3). Meningkatkan kualitas

masyarakat dan kontribusi Sumber Daya Manusi (SDM) daerah; dan 4). Meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan infrastruktur. Kecamatan Umpu Semenguk sendiri memiliki visi dan misi sendiri yaitu: visi “Bermartabat, Cerdas dan Unggul” dan misinya 1). Mewujudkan kualitas pelayanan publik dengan baik; 2). Meningkatkan kualitas SDM aparatur yang berintegritas dan cerdas; 3). Mewujudkan tata kelola administrasi perkantoran kampung yang baik dan akuntabel; dan 4). Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan kreatif.

Untuk mencapai tujuan dan visi dan misi Kecamatan Umpu Semenguk maka tidaklah berlebihan jika Kecamatan Umpu Semenguk memiliki tagline: “KITA UMPU SEMENGUK”, harapannya dengan adanya tagline ini seluruh aparatur, baik aparatur kampung maupun aparatur kecamatan dan masyarakat memiliki tujuan yang sama serta dapat memberikan semangat kebersamaan dalam membangun sehingga dapat mencapai tujuan dengan rasa memiliki yang tinggi.

4.2 Kondisi geografis Kecamatan Umpu Semenguk

Secara geografis Kecamatan Umpu Semenguk berada di titik koordinat - 4034’42,40938” S 104031’37,88198” E, Jalan Lintas Sumatera Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan. Karakteristik daratan, perbukitan dan bebatuan.

Batas wilayah Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Blambangan Umpu
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rebang Tangkas
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Blambangan Umpu
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Agung

Luas wilayah Kecamatan Umpu Semenguk adalah 32.376 Ha. Secara geografis Kecamatan Umpu Semenguk terdiri dari 13 Kampung, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Data Luas Wilayah Kecamatan Umpu Semenguk

No	Kode Wilayah	Kampung	Luas Wilayah (Ha)
1	18.08.2001	Negeri Batin	4.000
2	18.08.2002	Gistang	6.526
3	18.08.2003	Rambang Jaya	1.200
4	18.08.2004	Panca Negeri	2.121
5	18.08.2005	Negeri Bumi Putera	1.048
6	18.08.2006	Gedung Riang	650
7	18.08.2007	Gedung Batin	6.000
8	18.08.2008	Sidoarjo	575
9	18.08.2009	Bumi Ratu	825
10	18.08.2010	Sriwijaya	668
11	18.08.2011	Bratayudha	607
12	18.08.2012	Negeri baru	8.000
13	18.08.2013	Ojolali	506
Total Luas Kecamatan Umpu Semenguk			32.726

Sumber : Kecamatan Umpu Semenguk Tahun 2021.

4.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Umpu Semenguk

Untuk memperoleh gambaran perkembangan penduduk dalam jangka waktu yang lebih pendek (tahunan) diperlukan upaya untuk mendapatkan data dari sumber lain. Dalam hal ini sumber data utama yang dipergunakan dalam publikasi ini adalah hasil pengolahan database dari sistem kependudukan pada Disduk Capil Kabupaten Way Kanan, meskipun masih belum sempurna dalam sistem pengelolaan, data yang disajikan juga belum lengkap dalam menganalisis secara komprehensif tentang data kependudukan di Kecamatan Umpu Semenguk.

Data kependudukan Bidang Pemerintahan Kecamatan Umpu Semenguk bersifat *dejure* atau data penduduk yang terdaftar sesuai dengan jumlah penduduk yang terdata mengurus data kependudukan di setiap desa dan kelurahan. Jumlah penduduk di Kecamatan Umpu Semenguk pada tahun 2020 berjumlah 31.769 jiwa, yang terdiri dari 16.409 laki-laki dan 15.537 perempuan. Jumlah penduduk terbesar adalah pada kampung Negeri Baru yaitu 6.255 jiwa dan jumlah penduduk terendah adalah kampung Rambang Jaya yaitu 586 jiwa. Dapat dilihat lebih jelas dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 10. Jumlah Penduduk Kabupaten Umpu Semenguk Tahun 2020

No	Kampung	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Bratayudha	785	803	1.588
2	Gedung riang	514	548	1.062
3	Rambang jaya	332	254	586
4	Panca negeri	1.214	1.133	2.147
5	Negeri batin	2.972	2.780	5.752
6	Negeri bumi putera	1.067	1.042	2.109
7	Ojolali	621	654	1.275
8	Gistang	1.822	1.721	3.543
9	Negeri Baru	3.312	2.943	6.255
10	Gedung batin	726	701	1.428
11	Sidoarjo	1.071	1.089	2.160
12	Sriwijaya	785	799	1.584
13	Bumi ratu	1.228	1.070	2.298
Jumlah Keseluruhan		16.409	15.537	31.769

Sumber : Kecamatan Umpu Semenguk Tahun 2021.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa penduduk di Kecamatan Umpu Semenguk cukup padat artinya wajar saja bila kecamatan ini dimekarkan, untuk lebih meningkatkan aktivitas pelayanan dan mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah serta menampung aspirasi-aspirasi lainnya.

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk memberikan efek yang cukup baik pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat baik masyarakat Kecamatan Umpu Semenguk maupun Kabupaten Way kanan. Dengan adanya pemekaran kecamatan dan program pemberdayaan yang berupa program pengembangan serta pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia baik sumberdaya manusia yang ada di kecamatan, kampung atau desa dan menginventarisir sumber-sumber PAD dapat menjadi titik awal yang baik dalam mendukung upaya pemerintah daerah kabupaten Kabupaten Way Kanan untuk menjadi Kabupaten yang Unggul dan Sejahtera khususnya dalam hal pembangunan baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan politik. melalui pemekaran dan semua unsur pelayanan dalam hal ini pelayanan admisintrasi maupun juga dalam unsur pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan pada umumnya dilaksanakan dengan baik, penuh perhatian dan tanggung jawab dalam pelayanan publik untuk perkembangan atau kemajuan desa lebih khususnya untuk mensejahterahkan masyarakat.

Akan tetapi terbentuknya Kecamatan Umpu Semenguk ini masih terbentur dengan beberapa faktor seperti : kurangnya jumlah SDM maupun pengetahuan dalam mengelola sumberdaya alam yang ada, serta sarana berupa gedung-gedung pelayanan baik pelayanan pemerintahan, pendidikan maupun kesehatan. Namun dengan pelaksanaan program-program kecamatan yang paling utama yakni sosialisasi diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam mengurangi permasalahan atau faktor pelayanan, baik dalam urusan administrasi maupun kependudukan, serta mampu meningkatkan pembangunan ekonomi dan politik khususnya dalam hal peikiran dan pengambilan keputusan masyarakat.

6.2 Saran

Pemerintah kecamatan diharapkan dapat membantu dalam pengurusan pengadaan tempat ibadah, klinik, sekolah, perbaikan akses jalan maupun lokasi baik soal ketersediaan tanah dan melakukan komunikasi yang efektif kepada masyarakat tokoh-tokoh agama maupun tokoh kampung sekitar lokasi. Pemerintah kecamatan diharapkan juga dapat mengajukan usulan penambahan fasilitas kesehatan, pendidikan, akses jalan raya yang lebih baik agar dapat menjangkau serta meningkatkan minat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Pemerintah kecamatan juga diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih terkait pentingnya sekolah atau mendapatkan pendidikan, toleransi antar umat beragama lainnya, serta menjaga kesehatan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi* (Dharna A (Ed.); 1st Ed.). Gava Media.
- Abubakar, A., Mawar, S., & Syah, N. (2018). Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia. *Petita: JurnalKajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 3(2), 145–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/petita.v3i2.50>
- Adityawarman. (2020). Politik dan Kualitas Demokrasi. *Jurnal MODERAT*, 6(2), 397–409. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3516>
- Adryan, A., Erwin, E., & Jafrinur, J. (2018). Pelaksanaan Pemekaran Daerah Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci dan Dampaknya terhadap Wilayah Pinggiran Kota Sungai Penuh. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(3), 269. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.3.269-282>
- Akbar, S. (2018). Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jiaganis*, 3(1), 1–15. jurnal.stiaimantogiri.ac.id
- Ambya. (2019). Perkembangan Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Lampung (Model Tipologi Klassen). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(3), 199–210. <https://doi.org/10.23960/jep.v8i3.63>
- Anisah, A., & Soesilowati, E. (2018). Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(1), 44–50. <https://doi.org/10.15294/efficient.v1i1.27218>
- Antoro, D., Sari, R. D., & Trisiana, A. (2018). Peran Politik terhadap Pembangunan Nasional. *Jurnal Ilmiah: Global Citizen Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 50–64. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33061/glc.v5i1.2545>
- Ardianto, H. T., & Alfirdaus, L. K. (2020). Analisis Rencana Pemekaran Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat : Sebuah Skenario. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, 2(2), 99–120.
- Chendrawan, T. S. (2017). Sejarah Pertumbuhan Ekonomi. *Tirtayasa Ekonomika*, 12(1), 123. <https://doi.org/10.35448/jte.v12i1.4441>
- Episabri, E. (2019). Faktor Kegagalan Pemekaran Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Menjadi Daerah Otonom. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 1(2), 160–171. <https://doi.org/10.25077/jdpl.1.2.160-171.2019>

- Fuady R, W. (2012). Kajian Teori Dan Implementasi Pembangunan Terhadap Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akutansi*, 19(32). ejunal.stiedharmaputra-smg.ac.id
- Guswandi. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Sains & Bisnis* (Isa (Ed.); 1st Ed., Issue 1). Penebar Media Pustaka.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial* (Lutfiah (Ed.); 1st Ed., Issue April). Media Sahabat Cendekia.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqamah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (H. Abadi (Ed.); 1st Ed., Issue 1). Pustaka Ilmu. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (Zaiful (Ed.); 1st Ed.). Cv. Nur Lina. <http://eprints.unm.ac.id>
- Hertati, D. (2019). *Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Surabaya Single Windows Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Surabaya Pusat Kota Surabaya* (Cetakan Pe). CV. Mitra Sumber Rejeki.
- Hajar, A. S. (2011). *Perkembangan Pemekaran Wilayah Pasca Reformasi (Suatu Kajian Dari Prespektif Demokrasi Dan Hukum)*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Hambali, L. A. (2010). *Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Buton*. Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta 2010
- Hakim, A. (2017). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hertati, D. (2019). *Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Surabaya Single Windows Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Surabaya Pusat Kota Surabaya* (Cetakan Pe). CV. Mitra Sumber Rejeki.
- Hudi, M. (2020). Peran Politik dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(03), 232–248. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i03.2172>.
- Imanuel. (2016). Studi Tentang Proses Pemekaran Kecamatan Malinau Selatan menjadi tiga Kecamatan Kabupaten Malinau. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 4(2), 245–254. ejournal.pin.or.id.
- Ishak, D. (2017). Analisis Penataan Kecamatan Di Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9(2), 183–198. <https://doi.org/10.33701/jt.v8i2.619>.
- Ivakdalam, E. (2011). *Dampak pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan*

ekonomi di kabupaten merauke. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

- Jamaludin, A. N. (2016). Sosiologi Pembangunan. In *Pustaka Setia Bandung* (1st Ed.). Cv Pustaka Setia. <http://digilib.uinsgd.ac.id>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (F. Annisya & Sukarno (Eds.); 1st Ed.). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (Lpsp). www.karnopress.com.
- Kusumawardani, N., Soerachman, R., Laksono, A. D., Imantowati, L., Sari H, P., & Paramita, A. (2015). *Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan* (Erdian (Ed.); 1st Ed.). Penerbit Pt Kanisius. www.kanisiusmedia.com.
- Loba, F. V. P. E. (2018). Pemekaran Desa (Studi Kasus Pemekaran Desa Atuwalupang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Provinsi Ntt) [Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "Apmd" Yogyakarta]. In *Program Magister*. <http://repo.apmd.ac.id>
- Maulana, A. (2019). Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru Dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 169–186. <https://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja> .
- Mulyani, E. (2017). *Ekonomi Pembangunan* (S. Amalia (ed.); 1st ed.). UNY Press. <http://staffnew.uny.ac.id>.
- Mulyadi, M., Lestari, T. R. P., Alawiyah, F., Wahyuni, D., Astri, H., Martiany, D., Edmira, R., & Qodriyatun, S. N. (2019). *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan* (S. Susiana (Ed.); 1st Ed.). P3di Setjen Dpr Ri Dan Azza Grafika. www.academi.edu.com/acceleratingtheworld'sresearch.
- Maulana, I. (2019). *Analisis Kelayakan Pemekaran Daerah Imantomayu Barat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007* [Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2019]. <http://repository.unhas.ac.id>.
- Mumek, G. E., Watulingas, R. R., & Lowing, N. S. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*, 6(5), 42–49.
- Murniati. (2017). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Perkapita Di kabupaten Kerinci. *J-MAS: Jurnal Manajemen Dan Sains*, 2(1), 121–132. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/mas.v2i1.20>.
- Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja Volume*, 2(1), 152–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>.

- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial* (Lutfiah (ed.); 1st ed., Issue April). Media Sahabat Cendekia.
- Pandie, P. M. R. (2018). Feasibility Study For New Local Government In East-Central-South Regency East-South East Province Prima Maryos. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, X(2), 101–111. <http://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JAPD>.
- Pradono, J., Soerachman, R., Kusumawardani, N., & Kasnodihardjo. (2018). *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif* (E. Marta & A. Suwandono (eds.); 1st ed.). Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. www.litbang.depkes.go.id.
- Putra, H. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi. *JISPAR: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.37304/jispar.v9i1.1134>.
- Putri, R. N., & Syahar, F. (2020). Analisis Kelayakan Pemekaran Wilayah (Regional Expansion) Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. *Jurnal Buana Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial-UNP*, 4(1), 132–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/student.v4i1.749>.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan*. Humas Sekertaris Kabinet Republik Indonesia. www.setkab.go.id.
- Purnamasari, S. (2019). *Ekonomi Pembangunan* (S. Hidayati & E. Mulyanto (Eds.); 1st Ed.). Unpam Press. www.unpam.ac.id.
- Purwowibowo. (2018). *Pembangunan Sosial*. In *Pt Melvana Media Indonesia* (1st Ed.). Pt Melvana Media Indoneisa.
- Pradono, J., Soerachman, R., Kusumawardani, N., & Kasnodihardjo. (2018). *Panduan Penelitian Dan Pelaporan Penelitian Kualitatif* (E. Marta & A. Suwandono (Eds.); 1st Ed.). Lembaga Penerbit Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan. www.litbang.depkes.go.id.
- Raco, J. . (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Grasindo.
- Raharja, I. F. (2016). Telaah Hukum Kelayakan Pemekaran Kecamatan (Studi Kasus: Pemekaran Calon Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci). *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 1–21.
- Ridwan. (2016). *Pembangunan Ekonomi Regional* (T. S. Razak (ed.); 1st ed.). Pustaka Puitika.
- Rohmadin, S., & Batubara, Y. E. (2017). Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 109–122. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.386>.

- Setiowati, D., & Dewi, I. K. (2018). Pengembangan Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku Sebagai Wilayah Pemekaran Melalui Potensi Unggulan. In A. E. Pravitasari, E. Rustiadi, J. T. Hidayat, & D. O. Pribadi (Eds.), *Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) 2018* (1st ed., Issue Iicc). P4W LPPM IPB., <https://p4w.ipb.ac.id>.
- Silalahi, R., Nasution, M. H. T., & Matondang, A. (2019). Pengaruh Tingkat Persepsi Masyarakat Kecamatan Dolok Silau terhadap Realisasi Rencana Pemekaran di Kabupaten Simalungun. *Perspektif*, 8(2), 39. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2588>.
- Sitanggang, U. (2011). *Analisis Dampak Pemekaran Kabupaten Terhadap Pembangunan PARIwisata di Kabupaten Samosir*. Sekolah Pascasarjan Universitas Sumatera Utara Medan 2011.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.); 1st ed.). Literasi Media Publishing.
- Sumarlis. (2018). KAJIAN TUJUAN PEMEKARAN DESA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 129 TAHUN 2000 (Studi Kasus:Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman). (*JuPerSaTeK*): *Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, Dan Komputer*, 1(1), 119–132.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya*. In A. Tanzeh (Ed.), *Akademia Pustaka* (1st Ed., Issue Mei). Akademi Pustaka.
- Ticoalu, D. I., Kaawoan, J. ., & Lopian, M. . (2017). EFEKTIVITAS PEMEKARAN DESA DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modinding). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–13. ejournal.unsrat.ac.id.
- Tresiana, N. (2015). RATIONALITY DISTRICT POLICY PROLIFERATION AND VILLAGES. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 161–172. <http://jurnal.kemendagri.go.id>.
- Trikurniasih, E., Handayani, R., Santoso, A., & Soleh, A. (2019). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan dan Pelayanan Publik. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(2), 159–165. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i2.76>.
- Tului, T. B. (2019). Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 1183–1194. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3224>.
- Umar, H. (2020). Politik dan Teoritis. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 41(70), 8257–8274. journal.unas.ac.id.
- Utami, D., & Wahyu Deni Prasetyo, D. (2019). Perpustakaan berbasis inklusi

sosial untuk pembangunan Sosial-Ekonomi masyarakat. *VISI PUSTAKA: Buletin Jaringan Informasi Antar Perpustakaan*, 21(1), 31–38. <https://ejournal.perpusnas.go.id/vp/article/view/74>.

Waworuntu, C. (2017). Efektivitas Pemekaran Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Suatu Studi Di Desa Kolongan-Atas Kecamatan Sonder). *Jurnal Eksekutif*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16327>

Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. In I. Fatria (Ed.), *Gawe Buku* (1st ed.). Gawe Buku.

Yulianti, A. (2017). Efektivitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan Samarinda Kota, Di Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 5(3), 6327–6339. ejournal.an.fisip-unmul.ac.id.

Yuliati, E. (2011). Evaluasi Hasil Pemekaran: Studi Kasus Pemekaran Kabupaten [Universitas Indonesia]. In *Tesis: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*. <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/136717-T+28352-Evaluasi+hasil-full+text.pdf>.

Yuniningsih, T., & Kharisma, D. (2017). Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) DINAS Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Maagement Review*, 6(2), 770–781. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1410/jppmr.v6i2.16214>.

Yunus, S., Suaib, E., & Jopang. (2020). Analisis Dampak Pemekaran Kecamatan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka). *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 343–350. <http://ojs.uho.ac.id>.

Zamili, M. (2015). Menghindar Dari Bias: Praktik Triangulasi Dan Kesahihan Riset Kualitatif. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 283–304. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.97>.

Zuliani, D., & Martono, S. (2019). Optimalisasi Kualitas Pelayanan Prima Melalui Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 866–878. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i3.35003>.